



PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



 **DISKOMINFO**
TANA TORAJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kasih karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 ini memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dengan perencanaan kerjanya.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 ini dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun terakhir. Selanjutnya LAKIP ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan harapan merupakan landasan untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Makale, 21 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19671011 200312 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum	3
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	22
B. Perbandingan Capaian Kinerja dan Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun Lalu	23
C. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra.....	24
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja.....	25
E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
F. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan.....	28
G. Analisis Anggaran Per Sasaran.....	28
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan dokumen LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2021 yang melibatkan seluruh bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	SATUAN 2021	CAPAIAN KINERJA (%)	KET
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Semua Wilayah	Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang Dijangkau oleh Layanan Komunikasi dan Informatika	70%	70%	100%	Mencapai target
		Persentase OPD yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	70%	63%	91%	Tidak mencapai target
		Persentase Berita Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan	100%	100%	100%	Mencapai target
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Secara Internal	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	50%	10%	20%	Tidak mencapai target

Berdasarkan tabel di atas dari 4 (empat) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target dan 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021

adalah sebesar Rp.3.312.493.218,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.2.710.869.332,00 atau 81,84%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan good governance adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat di mana fokus pembangunan pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, private sektor dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Statistik dan urusan pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Tana Toraja.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 maka disusunlah LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021. LAKIP ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dalam bentuk capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 dalam pencapaian visi dan misi Bupati Tana Toraja tahun 2016-2021.

Tujuan dari LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja di masa yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dituangkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja.

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dipimpin oleh Kepala Dinas dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Program dan Evaluasi;
 - Subbagian Umum.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:

- Seksi Data dan Statistik;
 - Seksi Informasi dan Publikasi;
 - Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari:
- Seksi Dukungan Peralatan Teknologi;
 - Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - Seksi Keamanan Informasi dan Komunikasi.
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- Seksi Telekomunikasi;
 - Seksi Sumber Daya dan Layanan Publik;
 - Seksi Tata Kelola E-Government.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahahn bidang omunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Tana Toraja.

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian;
- Mengoordinasikan perumusan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan administrasi dinas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, bidang penyelenggaraan e-government dan bidang layanan komunikasi dan informatika;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, bidang penyelenggaraan e-government dan bidang layanan komunikasi dan informatika;
- Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- Menyenggarakan dan memberi dukungan fasilitasi pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;
- Menyenggarakan pemantauan dan evaluasi pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;
- Menyenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- Menyenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika;
- Melaksanakan tugas pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Daerah;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Menyenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelayanan teknis dan penyelenggaraan tugas kesekretariatan dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi:

- Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan, keuangan, pelaporan dan urusan umum dan kepegawaian;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan program kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, subbagian umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik, informasi dan publikasi, kemitraan dan komunikasi publik;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik, informasi dan publikasi, kemitraan dan komunikasi publik;
- Melakukan pembinaan dan melaksanakan program kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan E-Government dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan kebijakan teknis Bidang Penyelenggaraan E-Government, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana program kegiatan Bidang Penyelenggaraan E-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dukungan peralatan teknologi, pengembangan aplikasi dan keamanan informasi dan komunikasi;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dukungan peralatan teknologi, pengembangan aplikasi dan keamanan informasi dan komunikasi;
- Melakukan pembinaan dan pelayanan umum pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan Bidang Penyelenggaraan E-Government;

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan E-Government;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana program kegiatan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis telekomunikasi, sumber daya dan layanan publik dan tata kelola e-government;
- Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis telekomunikasi, sumber daya dan layanan publik dan tata kelola e-government;
- Melakukan pembinaan dan pelayanan umum melaksanakan program kegiatan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program kegiatan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

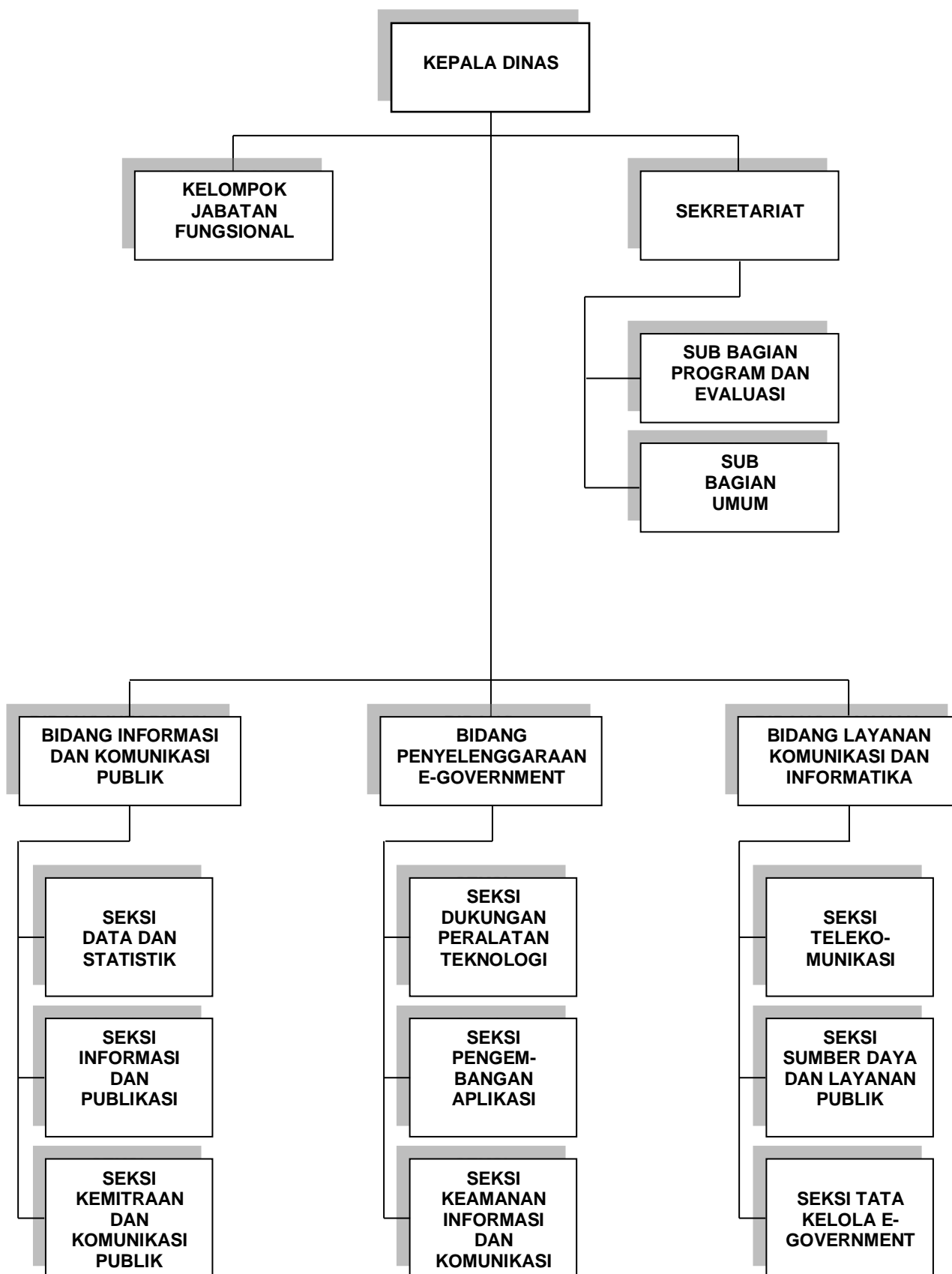
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana pada gambar I.1 berikut ini.

Gambar I.1
 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Tana Toraja



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan tentang akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja aparatur instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021 melalui kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Visi Kabupaten Tana Toraja adalah *“Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera”*. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi utama yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing;
2. Percepatan reformasi birokrasi dan penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, sosial kemasyarakatan, kerjasama dan kemitraan terutama diperdesaan;
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro rakyat;
4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pelayanan, pembangunan, kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang berusaha/investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dari kelima misi tersebut yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja adalah pada misi kelima, yaitu *“Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pelayanan, pembangunan, kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang berusaha/investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.”* Dengan tujuan *meningkatkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang* yang selanjutnya di jabarkan dengan sasaran yang berhubungan dengan pembangunan komunikasi dan informatika adalah *meningkatkan*

sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah.

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada aktifitas yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki dan kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan untuk pengamanan informasi secara internal.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja untuk tahun 2016-2021 sebagaimana pada tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika	Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah
2	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan untuk pengamanan informasi secara internal	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah

Indikator kinerja dari tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja untuk tahun 2021 sebagaimana pada tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Semua Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang Dijangkau oleh Layanan Komunikasi dan Informatika; 2. Persentase OPD yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 3. Persentase Berita Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan.
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Secara Internal	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi tugas pokok dan fungsi organisasi. Indikator kinerja dan target kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 dapat dilihat pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 sebagaimana terlampir.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU, sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Nomor : 003/SK/KOMINFO-TT/III/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja. Adapun IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja sebagaimana pada tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah	Persentase wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dijangkau oleh layanan komunikasi dan informatika	%	Daerah yang dijangkau layanan komunikasi $\frac{\text{Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja}}{\text{Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja}} \times 100$	Hasil survei dan laporan masyarakat
Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan penyediaan statistik sektoral secara optimal	Persentase jenis data sektoral statistik yang dipublikasikan	%	Jenis data statistik sektoral terpublikasi $\frac{\text{Jenis data statistik sektoral yang harus dipublikasikan}}{\text{Jenis data statistik sektoral yang harus dipublikasikan}} \times 100$	Hasil olah data Dinas Komunikasi dan Informatika dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik
Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan untuk pengamanan informasi secara internal	Persentase OPD yang menggunakan komunikasi persandian	%	Jumlah OPD yang telah difasilitasi menggunakan komunikasi persandian $\frac{\text{Jumlah seluruh OPD}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100$	Hasil olah data Dinas Komunikasi dan Informatika

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 dan

sumber daya anggaran yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 sebagaimana pada tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Semua Wilayah	Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang Dijangkau oleh Layanan Komunikasi dan Informatika	70	%
		Persentase OPD yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	70	%
		Persentase Berita Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan	100	%
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Secara Internal	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	50	%

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.312.493.218,00 dengan rincian dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana pada tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5
Rincian Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Pada APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.631.349.218,00	Mendukung Sasaran Strastegi I dan II
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	253.264.000,00	Mendukung Sasaran Strastegi I
3	Program Aplikasi Informatika	427.880.000,00	Mendukung Sasaran Strastegi I dan II
	Jumlah	3.312.493.218,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja sebagai pengemban amanah masyarakat Kabupaten Tana Toraja melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Lakip yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2016-2021 maupun Renja 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, LAKIP pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis dapat digolongkan sesuai PP No. 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sesuai dengan tabel skala nilai peringkat kinerja sebagaimana pada tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	≥90	Sangat baik	
2	75,00 – 89,99	Baik	
3	65,00 – 89,99	Cukup	
4	50,00 – 64,99	Kurang	
5	0 – 49,99	Sangat Kurang	

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Hasil pengukuran dari Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 sebagaimana pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	SATUAN 2021	CAPAIN KINERJA (%)	KET
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Semua Wilayah	Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang Dijangkau oleh Layanan Komunikasi dan Informatika	70%	70%	100%	Mencapai target
		Persentase OPD yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	70%	63%	90%	Tidak mencapai target

		Persentase Berita Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan	100%	100%	100%	Mencapai target
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Secara Internal	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	50%	10%	20%	Tidak mencapai target

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel III.2 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target dan 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 dengan tahun lalu sebagaimana pada tabel III.3 berikut ini.

Tabel III.3
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	KET
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Semua Wilayah	Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang Dijangkau oleh Layanan Komunikasi dan Informatika	68%	70%	Mengalami peningkatan
		Persentase OPD yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	30%	63%	Mengalami peningkatan
		Persentase Berita Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan	91,11%	100%	Mengalami peningkatan

2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Secara Internal	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	10%	10%	Tetap
---	--	----------------------------------	-----	-----	-------

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat dari 4 (empat) indikator kinerja tahun 2021 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mengalami peningkatan sementara 1 (satu) indikator kinerja tetap.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran kinerja dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 sebagaimana pada tabel tabel III.4 berikut ini.

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dengan Target RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA RPJMD
1	Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang Dijangkau oleh Layanan Komunikasi dan Informatika	80%	70%	85,5%

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 dengan target RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021, dari 1 (satu) indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan

dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja hasil realisasinya tidak mencapai target dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir pengukuran kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran I : Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Semua Wilayah

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel III.5 berikut ini.

Tabel III.5
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran I Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	SATUAN 2021	CAPAIN KINERJA (%)	KET
1	Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang Dijangkau oleh Layanan Komunikasi dan Informatika	70%	70%	100%	Mencapai target
2	Persentase OPD yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	70%	63%	99%	Tidak mencapai target
3	Persentase Berita Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan	100%	100%	100%	Mencapai target

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dijangkau oleh layanan komunikasi dan informatika dan persentase berita pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan dapat mencapai target karena:

1. Menjalin kerjasama dengan penyelenggara komunikasi seluler untuk mendirikan BTS pada daerah yang blankspot layanan telekomunikasi sehingga pada tahun 2021 dapat membangun 5 (lima) BTS di daerah blankspot layanan telekomunikasi.
2. Aktifnya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tana Toraja untuk mempublikasi berita pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), website dan media sosial.
3. Menjalin kerjasama dengan media untuk mempublikasi berita pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja persentase OPD yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak dapat mencapai target karena dukungan peralatan teknologi masih kurang memadai dan kesiapan OPD dalam menerapkan SPBE.

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Aplikasi Informatika.

2. Sasaran II : Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Secara Internal

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagaimana pada tabel III.6 berikut ini.

Tabel III.6
Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran II Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	SATUAN 2021	CAPAIN KINERJA (%)	KET
1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	50%	10%	20%	Tidak mencapai target

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

Indikator kinerja Indeks KAMI (keamanan informasi) tidak dapat mencapai target karena sarana dan prasarana serta SDM di bidang keamanan informasi masih sangat minim.

Untuk mencapai hasil tersebut sasaran ini didukung 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Aplikasi Informatika.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Dengan adanya pandemi Covid -19 di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja melakukan refocusing anggaran dan realokasi anggaran serta perubahan target kinerja. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2021, yaitu:

1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021;
2. Menjalinkan kerjasama dengan penyelenggara komunikasi seluler untuk mendirikan BTS pada daerah yang blankspot layanan telekomunikasi.

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja dapat diuraikan sebagaimana pada tabel 3.7 sebagaimana terlampir.

Berdasarkan tabel 3.7 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan adanya refocusing anggaran dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid -19. Pada umumnya semua program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Capaian fisik program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 terlaksana sebesar 80,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 81,84%. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

F. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dari Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja sebagaimana pada tabel 3.8 sebagaimana terlampir.

G. Analisis Anggaran Per Sasaran

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp.2.710.869.332,00 atau sebesar 81.84% dari total anggaran sebesar Rp.3.312.493.218,00. Realisasi anggaran tiap program sebagai sebagaimana pada tabel III.9 berikut ini:

Tabel III.9
Ralisasi Anggaran Program yang mendukung Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.631.349.218,00	2.509.353.014,00	95,36	Mendukung Sasaran I dan II
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	253.264.000,00	109.187.000,00	43,11	Mendukung Sasaran I
3	Program Aplikasi Informatika	427.880.000,00	92.329.318,00	21,58	Mendukung Sasaran I dan II

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari tugas pokok dan fungsi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan yang mencapai target dan 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun kendala yang ditemui oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 sehingga ada indikator kinerja yang tidak mencapai target, sebagai berikut:

1. SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas;
2. Sarana dan prasarana dalam mendukung layanan komunikasi dan informasi belum memadai;
3. Ketersediaan anggaran pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja belum memadai.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja perlu melakukan terobosan-terobosan, antara lain:

1. Peningkatan SDM melalui diklat dan bintek bidang teknologi informasi dan komunikasi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan komunikasi dan informasi;
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, efektifitas dan peningkatan profesionalisme aparatur sehingga konsistensi perencanaan dan

pelaksanaan yang telah dituangkan dalam renstra dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

4. Alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tupoksi.

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun LAKIP tahun 2021 ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja.

Makale, 21 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19671011 200312 1 002

Tabel III.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)			FISIK			% CAPAIAN	SISA ANGGARAN
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar								
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu								
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.964.773.218	1.910.152.358	97,22	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100,00	100,00	54.620.860
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja								
a	Pelaporan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	17.800.000	17.707.200	99,48	12 Laporan	12 Laporan	100,00	100,00	92.800
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar								
a	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4.800.000	4.800.000	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00	100,00	-
b	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.800.000	1.650.000	91,67	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100,00	150.000
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	209.692.000	190.659.803	90,92	12 Laporan	12 Laporan	100,00	100,00	19.032.197
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi								
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	238.420.000	238.282.300	99,94	9 Unit	9 Unit	100,00	100,00	137.700

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)			FISIK			% CAPAIAN	SISA ANGGARAN
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia								
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	27.328.800	26.116.800	95,57	12 Laporan	12 Laporan	100,00	100,00	1.212.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	49.000.000	47.925.500	97,81	12 Laporan	12 Laporan	100,00	100,00	1.074.500
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1.796.000	1.120.000	62,36	12 Laporan	12 Laporan	100,00	100,00	676.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara								
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	34.714.000	23.614.182	68,02	1 Unit	1 Unit	100,00	100,00	11.099.818
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36.955.200	18.689.371	50,57	4 Unit	1 Unit	100,00	100,00	18.265.829
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44.270.000	28.635.500	64,68	14 Unit	14 Unit	100,00	100,00	15.634.500
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten								
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik								
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik (pelatihan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR))	34.304.000	-	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	34.304.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)			FISIK			% CAPAIAN	SISA ANGGARAN
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		
b	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bulentín)	42.240.000	-	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	42.240.000
c	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik (sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID))	34.304.000	18.442.000	53,76	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100,00	15.862.000
d	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media (publikasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL))	122.400.000	90.745.000	74,14	1 Layanan	1 Layanan	100,00	100,00	31.655.000
e	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan (layanan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas)	20.016.000	-	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	20.016.000
c	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika								
1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government								
a	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik (penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lima tahunan)	100.000.000	-	0,00	1 Dokumen	-	0,00	0,00	100.000.000
b	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	37.900.000	19.834.318	52,33	1 Unit	1 Unit	100,00	100,00	18.065.682
c	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	289.980.000	72.495.000	25,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100,00	217.485.000
JUMLAH			3.312.493.218	2.710.869.332	81,84			80,00	80,00	601.623.886

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)			FISIK			% CAPAIAN	SISA ANGGARAN
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		

Makale, 21 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP

NIP. 19671011 200312 1 002

Tabel III.8
 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
							TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Semua Wilayah	Persentase Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang Dijangkau oleh Layanan Komunikasi dan Informatika	70%	70%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.631.349.218	2.509.353.014	95,36
						Program Informasi dan Komunikasi Publik	253.264.000	109.187.000	43,11
		Persentase OPD yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	70%	63%	90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sda	Sda	Sda
						Program Aplikasi Informatika	427.880.000	92.329.318	21,58
		Persentase Berita Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Dipublikasikan	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sda	Sda	Sda
						Program Informasi dan Komunikasi Publik	Sda	Sda	Sda
2	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi Secara Internal	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	50%	10%	20%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sda	Sda	Sda
						Program Informasi dan Komunikasi Publik	Sda	Sda	Sda

Makale, 21 Februari 2022

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Tana Toraja**



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP
 NIP. 19671011 200312 1 002

PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE REK					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN RENCANA 2021						OPD PENAGGUNG JAWAB				
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI			TARGET KINERJA		KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	
								7	8	9	10	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.820.400.000	3.775.242.000	- 10.045.158.000	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							13.820.400.000	3.775.242.000	- 10.045.158.000	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian berjalan sesuai standar			95%	95%	5.300.400.000	2.998.342.000	- 2.302.058.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja tepat waktu			95%	95%	2.150.000.000	2.060.000.000	- 90.000.000		
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan setiap bulan	Makale	Makale	12 bulan	21 orang	1.950.000.000	2.060.000.000	110.000.000		
	2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya pembayaran jasa pengelola administrasi keuangan dan pengelola kegiatan setiap bulan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapat jasa administrasi dalam pelaksanaan tugas	Makale	-	12 bulan	-	200.000.000	-	200.000.000		
	2	16	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja			95%	95%	100.000.000	24.800.000	- 75.200.000		
	2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya survei dan monitoring serta pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk memenuhi target retribusi menara telekomunikasi	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja	Makale	Makale	12 bulan	12 laporan	100.000.000	24.800.000	- 75.200.000		
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja			95%	95%	340.000.000	12.000.000	- 328.000.000		
	2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan	Makale	-	50 stel	-	60.000.000	-	60.000.000		
	2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai lulus diklat berdasarkan tupoksi	Makale	-	9 orang	3 orang	200.000.000	12.000.000	- 188.000.000		
	2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai mengikuti bimtek yang mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan	Makale	-	1 kegiatan	-	80.000.000	-	80.000.000		
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang berjalan sesuai standar			95%	95%	522.000.000	348.042.000	- 173.958.000		
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	Makale	Makale	5 jenis	10 lembar	12.000.000	12.000.000	-		
	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar lokal dan regional setiap hari	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exp bahan bacaan dan perundang-perundangan disediakan	Makale	Makale	3 jenis	1 jenis	10.000.000	1.800.000	- 8.200.000		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja yang terselenggara	Makale	Makale	12 bulan	477 kali	500.000.000	334.242.000	-	165.758.000	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja penunjang yang terpenuhi			95%	95%	1.770.000.000	340.000.000	-	1.430.000.000	
	2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	Makale	-	5 unit	-	570.000.000	-	-	570.000.000	
	2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Makale	Makale	12 jenis	7 jenis	1.200.000.000	340.000.000	-	860.000.000	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia			95%	95%	180.400.000	78.500.000	-	101.900.000	
	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya alat tulis kantor dan materi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Makale	Makale	55 jenis	52 jenis	40.000.000	27.500.000	-	12.500.000	
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan telepon serta internet kantor setiap bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	Makale	Makale	12 bulan	3 jenis	76.400.000	49.000.000	-	27.400.000	
	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor (kebersihan kantor)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Makale	Makale	12 bulan	10 jenis	64.000.000	2.000.000	-	62.000.000	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara			95%	95%	238.000.000	135.000.000	-	103.000.000	
	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Makale	Makale	1 unit	1 unit	40.000.000	40.000.000	-	-	
	2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	Makale	Makale	4 unit	4 unit	98.000.000	45.000.000	-	53.000.000	
	2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Makale	Makale	12 bulan	8 jenis	50.000.000	50.000.000	-	-	
	2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Makale	-	1 unit	-	50.000.000	-	-	50.000.000	
	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten			70%	70%	1.300.000.000	281.024.000	-	1.018.976.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dengan baik			70%	70%	1.300.000.000	281.024.000	-	1.018.976.000	
	2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya sosialisasi Laporan SP4N	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pelatihan Laporan SP4N	Makale	Makale	1 kegiatan	108 orang	200.000.000	34.304.000	-	165.696.000	
	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terbitnya buletin pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan tersebarnya SMS gateway	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website resmi dan buletin	Makale	Makale	12 bulan	228 berita	150.000.000	70.000.000	-	80.000.000	
	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya sosialisasi PPID	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti sosialisasi PPID	Makale	Makale	1 kegiatan	108 orang	150.000.000	34.304.000	-	115.696.000	
	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya penyebaran informasi melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Layanan Hubungan Media	Jumlah berita dan informasi lainnya yang dipublikasi melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Makale	Makale	12 bulan	920 jenis	250.000.000	122.400.000	-	127.600.000	
	2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya penyuluhan internet sehat	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pegawai yang dilatih untuk mengelola komunikasi publik	Makale	-	1 kegiatan	-	100.000.000	-	-	100.000.000	
	2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya advetorial/ publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan informasi melalui sound sistem dan pengumuman keliling	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah pelayanan sound sistem dan pengumuman keliling yang terlaksana	Tana Toraja	Tana Toraja	12 bulan	144 kali	150.000.000	20.016.000	-	129.984.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	16	02	2.01	13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten yang diadakan	Tana Toraja	-	1 unit	-	300.000.000	-	-	300.000.000	
	2	16	03			PROGRAM PENGELOAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	PROGRAM PENGELOAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika			63%	63%	6.820.000.000	495.876.000	-	6.324.124.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase website pemerintah daerah yang dikelola dengan baik	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase website pemerintah daerah yang dikelola dengan baik			100%	-	2.450.000.000	-	-	2.450.000.000	
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan domain dan sub domain website pemda	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang dilatih dalam mengelola admin web	Tana Toraja	-	1 unit	-	50.000.000	-	-	50.000.000	
	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terseleenggaranya sistem jaringan intra dan internet pemerintah daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, Kelurahan dan Lembang yang difasilitasi dalam penyaluran berita dari dan ke pusat	Tana Toraja	-	12 bulan	-	2.400.000.000	-	-	2.400.000.000	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengelola e-government			63%	63%	4.370.000.000	495.876.000	-	3.874.124.000	
	2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Berbasis Elektronik	Tersedianya rencana induk TIK	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen RITIK yang disusun	Makale	Makale	1 kegiatan	1 dokumen	120.000.000	100.000.000	-	20.000.000	
	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah server yang dikelola	Makale	-	12 bulan	-	1.850.000.000	-	-	1.850.000.000	
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya pengembangan aplikasi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Tana Toraja	Makale	12 bulan	1 jenis	850.000.000	47.900.000	-	802.100.000	
	2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya pemasangan dan pembayaran internet kecamatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah sambungan internet publik yang dipasang dan dimanfaatkan masyarakat	Tana Toraja	Tana Toraja	12 bulan	9 unit	1.350.000.000	347.976.000	-	1.002.024.000	
	2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengembangan SDM Teknologi informasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur yang telah mengikuti bintek bidang teknologi informasi dan komunikasi	Makale	-	2 kegiatan	-	200.000.000	-	-	200.000.000	
	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah			13%	-	200.000.000	-	-	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk menggunakan data statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk menggunakan data statistik sektoral			13%	-	200.000.000	-	-	200.000.000	
	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah aparatur yang melaksanakan kegiatan pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Tana Toraja	-	12 bulan	-	200.000.000	-	-	200.000.000	
	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan komunikasi persandian			10%	-	200.000.000	-	-	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi untuk memanfaatkan komunikasi persandian			100%	-	200.000.000	-	-	200.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya pengelolaan dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aparatur yang mengikuti literasi keamanan informasi pemerintah daerah	Tana Toraja	-	12 bulan	-	200.000.000	-	200.000.000	
JUMLAH														13.820.400.000	3.775.242.000	-	10.045.158.000

Makale, 07 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja



Ir. O. BERTHY MANGONTAN, M.Adm.KP
NIP. 19671011 200312 1 002